



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sampai pada pelaporan hasil kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini memuat tentang pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Program dan kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan target capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan pembangunan di desa dan kelurahan pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum.

Kuala Tungkal, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MULYADI, S.Pd, M.Kes

Pejabat Muda

NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	1
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
E. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5
F. SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022	9
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	16
BAB IV PENUTUP	26
Lampiran; Perjanjian Kinerja 2022	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6
Tabel II.1 Indikator dan Target Program	8
Tabel II.2 Indikator dan Target IKK outcome	8
Tabel II.3 Tabel sasaran, strategis, kebijakan dan program	9
Tabel II.4 Tabel Rencana Kerja Tahunan 2022	9
Tabel II.5 Tabel Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022	12
Tabel III.1 Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	14
Tabel III.2 Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17
Tabel III.3 IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17
Tabel III.4 Realisasi Kinerja Tahun 2022	17
Tabel III.5 RPJMD 2021-2026	21
Tabel III.6 Tabel Anggaran dan Realisasi	22

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya Penataan Desa
2. Meningkatnya Kerjasama Desa
3. Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa
4. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;

1. Belum optimalnya penataan desa
2. Belum optimalnya Kerjasama yang dilaksanakan oleh desa
3. Masih rendahnya pengetahuan aparatur desa terhadap administrasi pemerintahan desa
4. Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan, bina administrasi pemerintahan desa, dan bina pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 2(dua) subbagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan fungsi;

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi; ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut LHP
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup pembangunan pemberdayaan masyarakat dan kawasan perdesaan.

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan masyarakat desa, pengelolaan pelayanan sosial dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong, tradisi adat dan budaya masyarakat, advokasi dan kemitraan.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengembangan usaha BUM desa dan BUM desa bersama, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa serta usaha ekonomi masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha pemasaran, pengelolaan sumber daya alam, serta teknologi tepat guna, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina administrasi pemerintahan desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bina administrasi pemerintahan desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan desa, batas desa, kewenangan desa dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan desa
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pemilihan kepala desa, perangkat desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup bina kelembagaan dan kerjasama desa, badan permusyawaratan desa, kelembagaan desa, perencanaan pembangunan desa, evaluasi perkembangan desa, dan profil desa, dan

- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

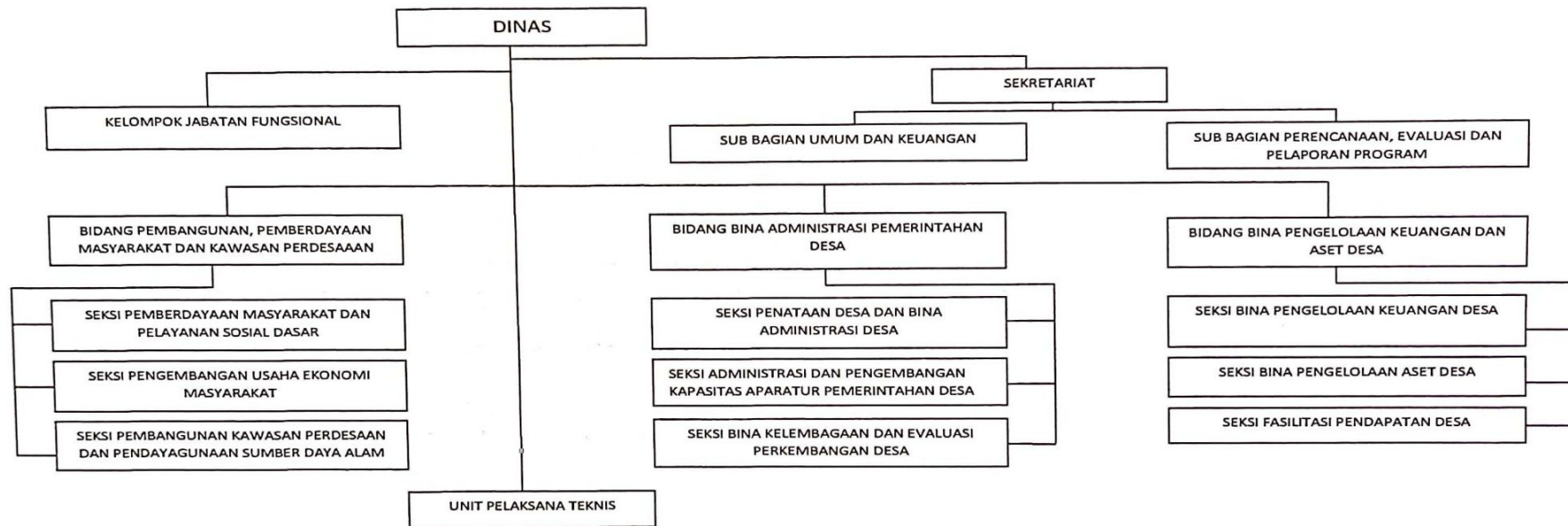
Bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang ini menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa , pelaporan keuangan desa, sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES)
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan aset desa, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, pelaporan aset desa, sistem informasi aset desa (SIPADES)
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain desa dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2022

E. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka keberhasilan melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2021 sebanyak 25 orang ASN dan 25 orang TKK, sesuai table dibawah ini;

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pangkat	Gol	Jumlah	Pendidikan					
				S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pembina Utama Muda	IV /c	1	1					
2	Pembina Tingkat I	IV /b	1	1					
3	Pembina	IV /a	3		3				
4	Penata Tingkat I	III/d	9	1	8				
5	Penata	III/c	2		2				
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1		1				
7	Penata Muda	III/a	2		1		1		
8	Pengatur Tingkat I	II/d	3				3		
9	Pengatur	II/c	2				2		
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1				1		
11	Pengatur Muda	II/a	-						
12	Honorar	-	25		8		17		

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu;

1. Visi

“ Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021-2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis
3. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke 3 (tiga), yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik”

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Meningkatkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik dan Meningkatkan perekonomian desa dengan mendorong desa untuk mengembangkan Kerjasama dan potensi desa.

4. Sasaran

Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Sasaran Program yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2022

akan dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

1. Meningkatnya penataan desa
2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
3. Meningkatnya Kerjasama desa
4. Meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan

5. Indikator

Tabel II.1. Indikator dan Target Program

No.	Indikator Sasaran Program	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa	114 desa
2.	Persentase desa yang tertata dengan baik	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%
3.	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	-	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD	13 BKAD
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel II.2. Tabel Indikator dan Target IKK outcome

No.	Indikator Outcome	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Persentase pengentasan Desa Tertinggal	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase peningkatan Desa Mandiri	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Tabel II.3. Tabel Sasaran, strategis, kebijakan dan program

Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintahan desa secara lebih profesional dan efisien melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	Pembinaan terhadap Kepala Desa, BPD, Bendahara Desa dan perangkat desa serta pengurus BUM desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya penataan desa		Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa dengan dasar adanya perubahan terhadap peraturan yang lebih tinggi	Program Penataan Desa
Meningkatnya jumlah kerjasama yang dilakukan oleh desa	Mendorong terbentuknya dan aktifnya BUM desa dan BUM desa bersama serta peningkatan kerjasama desa yang difasilitasi oleh BKAD	Melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM desa dan BUM desa bersama serta BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)	Program Kerjasama desa
Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Melaksanakan penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Melakukan pembinaan terhadap Posyantek, posyandu, kelompok usaha ekonomi masyarakat dan Kelompok PKK serta pelaksanaan BBGRM	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Pada Tahun 2022 ini, terjadi perubahan indikator yang menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut;

Tabel II.4. Tabel Rencana Kerja Tahun 2022

KODE REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2022

2	13	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tahunan yang disusun	6 Dokumen
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
2	13	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	100%
2	13	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	51 Paket
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi umum	100%
2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket
2	13	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	56 Paket
2	13	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1020 Paket
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 Paket
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1050 Dokumen
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan
2	13	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase peningkatan pelayanan umum	100%
2	13	01	2.08	01	Penyediaan surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2022

2	13	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana layak guna	100%
2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	100%
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	114 Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 dokumen
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	100%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya	114 Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	114 dokumen
2	13	04	2.01	05	Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	157 orang
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen
2	13	04	2.01	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	43 laporan
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa	1 dokumen
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	114 dokumen
2	13	04	2.01	15	Sub Keg. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%
2	13	05	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah PKK dan posyandu yang diberdayakan	422 lembaga kemasyarakatan
2	13	05	2.01	03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	422 lembaga
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel II.5 Tabel Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80
		Nilai SAKIP Dinas PMD	65
2.	Meningkatnya penataan desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	-
3.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2022

4.	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD
5.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2022, merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap apa yang akan dicapai pada tahun 2022. Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja, merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan Kepala Perangkat Daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Memperkuat kinerja pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan urusan daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80	78,41
		Nilai SARIP Dinas PMD	65	68,29
2.	Memperkuat pemerintahan desa	Pernyataan desa dengan penataan yang baik	-	-
3.	Memperkuat penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa
4.	Memperkuat kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	13 BKAD
5.	Memperkuat kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang diberdayakan	100%	100%

Capaian berdasarkan Data IDM pada Tahun 2022, dari keseluruhan 114 desa. Jumlah Desa Mandiri ada 4 atau 3,51%, yaitu; Desa Adi Purwa, Desa Purwodadi, Desa Pnang Gading dan Desa Bukit Harapan. Jumlah Desa Maju ada 23 Desa atau 20,16%. Jumlah Desa Berkembang 87 Desa atau 76,32%.

A. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dilaksanakan Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, dimana pemasalahannya belum teridentifikasinya potensi yang ada untuk pengembangan wilayah Kawasan perdesaan. Pendorongnya adalah peraturan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor:14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

B. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program ini dengan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa, telah dilaksanakan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada 114 Desa.
2. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, telah dilaksanakan pelatihan 43 Kepala Desa dan 114 Sekretaris Desa.
3. Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar desa telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 113 BUMDesa.
4. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, telah dilaksanakan pemilihan kepala desa di 43 Desa.
5. Fasilitasi penyusunan profil desa, telah dilaksanakan penyusunan profil desa
6. Fasilitasi pengelolaan asset desa, telah dilaksanakan pengelolaan asset desa
7. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa dimana capaian terkendala sulitnya mencapai kata sepakat tentang batas desa, dan dilaksanakan sosialisasi di 7 (tujuh) kecamatan untuk mendorong adanya Kesepakatan Batas Desa.
8. Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan, telah dilaksanakan Desa Purwodadi menjadi Juara I tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional.

C. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. Sub kegiatan yang dilaksanakan;

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat. Telah dilaksanakan lomba posyandu dan pembinaan bagi KPM (Kader Pembangunan Masyarakat). Adanya pergantian KPM menjadi kendala yang menyebabkan kurang optimalnya kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
2. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Telah dilaksanakan lomba inovasi alat TTG dan lomba sekretariat posyantekdes. Permasalahannya adalah masih kurangnya motivasi pengurus posyantek desa untuk memasyarakatkan teknologi tepat guna di desanya. Pemecahannya adalah dengan adanya hadiah yang lebih menarik.
3. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Telah dilaksanakan 10 program pokok PKK. Kendalanya adalah jadwal kegiatan dari pusat/provinsi yang belum dapat dipastikan, pemecahannya dengan menyediakan penganggaran yang fleksibel

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tabel III.2. Capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas PMD	80	78,41	98%
		Nilai SAKIP Dinas PMD	65	68,29	105%
2.	Meningkatnya penataan desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	-	-	-
3.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan tertib administrasi	114 desa	114 desa	100%
4.	Meningkatnya kerjasama desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi	13 BKAD	13 BKAD	100%
5.	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang diberdayakan	100%	100%	100%

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti table berikut;

No.	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1.	86-100	Sangat Baik
2.	70-85	Baik
3.	50-69	Cukup
4.	<50	Gagal

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

Berdasarkan Tabel III.2. Nilai capaian yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk dalam predikat sangat baik.

Tabel III.3. IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Unsur Pelayanan	NRR	NRR tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,15	0,35
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,03	0,33
U3	Waktu penyelesaian	2,95	0,32
U4	Biaya/tarif	3,75	0,41
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,07	0,34
U6	Kompetensi pelaksana	3,13	0,34
U7	Perilaku pelaksana	3,13	0,34
U8	Sarana dan prasarana	2,81	0,34
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,49	0,38
Nilai Indeks (NI)			3,14
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			78,41
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

Dalam unsur system, mekanisme, dan prosedur (U2) waktu penyelesaian (U3) dan sarana dan prasarana (U8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih perlu untuk ditingkatkan.

Tabel III.4. Realisasi Kinerja Tahun 2022

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		
Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan		
Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	Jumlah pegawai ASN 25 orang per Desember 2022	-
Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		
Kegiatan Administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%	100%		
Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	51 Paket	48 Paket	Jumlah pegawai ASN 23 orang, TKK 25 orang	-
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	100%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	12 Paket		
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 Paket	56 Paket		
Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	1020 Paket	805 Paket	Anggaran berlebih	Pengurangan anggaran di tahun 2013
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Paket	12 Paket		
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1050 Dokumen	997 Dokumen	4 langganan koran (mediator, jambi independent, tribun, jambi ekspres)	-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 Laporan	635 Laporan	SSH perjalanan dinas lebih kecil	
Kegiatan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan		
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan		
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan		

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 Unit	13 Unit		
Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	17 Unit	1 unit desktop dan 2 laptop, biaya perbaikannya besar	Direncanakan pengadaan di Tahun 2023
Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Unit	2 Unit	1 unit gedung sekretariat PKK tidak dianggarkan	Direncanakan pembangunan gedung baru di Dinas PUPR
Program Peningkatan Kerjasama antar Desa	100%	100%		
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	114 Desa	114 Desa		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%		
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	114 Desa	114 Desa		
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	114 dokumen	114 dokumen		
Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	157 orang	157 orang		
Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	1 dokumen	1 dokumen		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	43 laporan	43 laporan		
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan profil desa	1 dokumen	1 dokumen		
Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa	114 dokumen	114 dokumen		
Sub Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	10 Desa	6 Desa	Desa belum melakukan kesepakatan	Menyurati Camat dan Desa untuk melakukan penegasan dan penetapan batas desa serta melakukan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

				sosialisasi 7(tujuh) Kecamatan	di
Sub Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	100%			
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	422 lembaga kemasyar akatan	422 lembaga kemasyar akatan			
Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	422 lembaga	422 lembaga			
Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan	1 laporan			
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 dokumen	1 dokumen			

2) Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2022

Tabel. III.5 RPJMD 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi awal (2020)	Target Tahun						Realisasi Tahun		Capaian	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
13.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	4206	100%	100%
13.3	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.4	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.5	Persentase pengentasan desa tertinggal (IKK Outcome)	60,35%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%	100%	100%	100%
13.6	Persentase peningkatan status desa mandiri (IKK Outcome)	0,00%	0,00%	1,10%	1,09%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00%	1,10%	100%	100%

- 3) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
- Sumber Daya Manusia sejumlah 25 orang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dirasakan masih kurang untuk melaksanakan pembinaan terhadap 114 Desa.
- Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang menjadi jalan menuju pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2022, beserta jumlah anggaran dan realisasi penggunaannya adalah sebagai berikut;

Tabel III.6 Tabel Anggaran dan Realisasi

TAHUN ANGGARAN 2022									
KODE REKENING					KETERANGAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp8.299.762.682	Rp7.059.167.184	Rp1.240.595.498	85,05
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.453.239.023	Rp3.601.930.226	Rp851.308.797	80,88
2	13	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp40.200.000	Rp38.200.000	Rp2.000.000	95,02
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp40.200.000	Rp38.200.000	Rp2.000.000	95,02
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.588.806.377	Rp2.829.057.270	Rp759.749.107	78,83
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.434.306.877	Rp2.674.557.770	Rp759.749.107	77,88
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp154.499.500	Rp154.499.500	Rp0	100,00
2	13	01	2.02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp20.400.000	Rp19.200.000	Rp1.200.000	94,12
2	13	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp20.400.000	Rp19.200.000	Rp1.200.000	94,12
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp551.588.890	Rp484.885.214	Rp66.703.676	87,91

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN 2022

2	13	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp2.933.599	Rp2.933.599	Rp0	100,00
2	13	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp43.999.422	Rp43.999.422	Rp0	100,00
2	13	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp17.850.000	Rp13.900.000	Rp3.950.000	77,87
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan penggandaan	Rp40.341.719	Rp35.050.000	Rp5.291.719	86,88
2	13	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp4.200.000	Rp3.988.000	Rp212.000	94,95
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp442.264.150	Rp385.014.193	Rp57.249.957	87,06
2	13	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp79.974.306	Rp66.310.239	Rp13.664.067	82,91
2	13	01	2.08	01	Penyediaan surat menyurat	Rp1.440.000	Rp1.440.000	Rp0	100,00
2	13	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp63.600.000	Rp49.935.933	Rp13.664.067	78,52
2	13	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp14.934.306	Rp14.934.306	Rp0	100,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp172.269.450	Rp164.277.503	Rp7.991.947	95,36
2	13	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan	Rp122.342.450	Rp119.227.550	Rp3.114.900	97,45
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp13.280.000	Rp8.410.000	Rp4.870.000	63,33
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp36.647.000	Rp36.639.953	Rp7.047	99,98
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp43.323.818	Rp34.178.818	Rp9.145.000	78,89
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Rp43.323.818	Rp34.178.818	Rp9.145.000	78,89
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Rp43.323.818	Rp34.178.818	Rp9.145.000	78,89
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp2.519.876.391	Rp2.367.290.461	Rp152.585.930	93,94
2	13	04	2.01		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp2.519.876.391	Rp2.367.290.461	Rp152.585.930	93,94
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp150.450.000	Rp147.600.000	Rp2.850.000	98,11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

**TAHUN
2022**

2	13	04	2.01	05	Sub Keg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp306.557.991	Rp272.957.801	Rp33.600.190	89,04
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa	Rp72.065.000	Rp72.065.000	Rp0	100,00
2	13	04	2.01	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades	Rp1.465.778.410	Rp1.458.602.660	Rp7.175.750	99,51
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi penyusunan profil desa	Rp59.900.000	Rp59.900.000	Rp0	100,00
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Rp60.450.000	Rp57.900.000	Rp2.550.000	95,78
2	13	04	2.01	15	Sub Keg. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp295.424.990	Rp197.625.000	Rp97.799.990	66,90
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Rp109.250.000	Rp100.640.000	Rp8.610.000	92,12
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp1.283.323.450	Rp1.055.767.679	Rp227.555.771	82,27
2	13	05	2.01		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Rp1.283.323.450	Rp1.055.767.679	Rp227.555.771	82,27
2	13	05	2.01	03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp235.624.750	Rp233.602.750	Rp2.022.000	99,14
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Rp147.699.344	Rp74.100.000	Rp73.599.344	50,17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DINAS PMD

TAHUN
2022

2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp899.999.356	Rp748.064.929	Rp151.934.427	83,12
---	----	----	------	----	--	---------------	---------------	---------------	-------

**BAB IV
PENUTUP**

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun ada kendala yang dihadapi. Untuk kedepan, agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia agar tercapai sasaran strategis yang diinginkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang merupakan merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisien. Semoga ditahun-tahun mendatang program dan kegiatan DPMD capaian kinerjanya akan lebih baik lagi, Amin.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MUEYADI, S.Pd, M.Kes

Pada Utama Muda

NIP. 19650110 198903 1 011